

Siaran Pers

SNAK TAHUN 2016-2019 DAN DIALOG NASIONAL PROGRAM BANTUAN HUKUM

JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia kembali meluncurkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) Tahun 2016-2019, yang merupakan pembaruan dari SNAK Tahun 2009.

Acara peluncuran di gedung Bappenas itu dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan dihadiri oleh Direktur Program Pembangunan PBB (UNDP) Indonesia Christophe Bahuet, serta Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik.

SNAK merupakan hasil kerja sama antara Bappenas, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM serta Ombudsman RI dalam proyek *Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI)* yang didukung oleh UNDP Indonesia dan Kedutaan Besar Norwegia.

Berbeda dengan SNAK sebelumnya yang mengutamakan reformasi hukum dan kebijakan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi semua warga negara Indonesia, SNAK Tahun 2016-2019 mengutamakan dampak dari berbagai reformasi tersebut agar berfokus pada: 1) perlindungan hukum serta akses masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar; 2) mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan menjunjung hak asasi manusia; 3) bantuan hukum bagi masyarakat miskin, rentan dan terpinggirkan; dan 4) pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berkepastian hukum dan adil. Dengan memusatkan perhatian pada keempat hal tersebut, SNAK Tahun 2016-2019 diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengetahui dan mempertahankan haknya.

Sejak peluncuran SNAK Tahun 2009, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyediakan dan memenuhi hak-hak masyarakat dalam mendapatkan keadilan; diantaranya dengan menghasilkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum serta Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 yang menjadi landasan hukum bagi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Jakarta, 10 Mei 2016

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon (021) 31936207, 3905650; Faksimile (021)
3145374
Email: humas@bappenas.go.id